

Pencegahan radikalisme di kalangan remaja melalui Pembelajaran PPKn

Nurkhalisha Salsabila, *Maria Montessori, Junaidi Indrawadi, Tetti Eka Purnama

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Maria Montessori

E-mail: mariamontessori@fis.unp.ac.id

Abstract

This study is motivated by the increasing potential spread of radicalism among adolescents, which may influence students' cognitive patterns, attitudes, and behaviors. Schools, as formal educational institutions, play a strategic role in preventing the development of radical ideologies, particularly through Civic Education (PPKn). This study aims to describe the implementation of radicalism prevention among adolescents through PPKn learning at SMAS Nurul Ikblass X Koto, Tanah Datar Regency, and to identify the supporting factors in its implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Informants were selected using purposive sampling, consisting of PPKn teachers, the principal, vice principals in curriculum and student affairs, and students. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, including lesson plans (RPP) and school regulations. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that radicalism prevention is implemented through democratic learning practices, the modeling of moderate attitudes, respect for students' opinions, the internalization of anti-radical values, and the prevention of student grouping based on particular viewpoints. In addition, supporting factors include an open and inclusive school environment, the application of universal values, the involvement of alumni and parents, and sustained communication. These findings suggest that PPKn learning functions as a strategic medium for character formation and the strengthening of students' tolerance, thereby contributing to the prevention of radicalism among adolescents.

Article History

Received: 27 April
2026

Accepted: 31 May
2026

Published: 04 June
2026

Keywords:

Radicalism
Preventive, Civic
Education,
Character Formation

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah salah satu masalah yang semakin mendesak yang memerlukan solusi segera. Ini membahayakan keamanan negara dan stabilitas sosial dan budaya Indonesia karena radikalisme ini telah menjadi topik yang hangat di dalam maupun luar negeri. Radikalisme akan lebih mudah menyebar di kalangan remaja dengan kondisi zaman yang serba teknologi. Radikalisme bisa menyebar melalui media sosial yang sering di gunakan oleh kalangan remaja, dengan kondisi ini paham radikal mudah untuk mempengaruhi mereka, karena kelompok usia remaja ini sedang berada dalam fase mencari jati dirinya masing-masing (Julita Esra dkk, 2024).

Radikalisme ini menjadi masalah karena dampaknya dapat merusak sistem nilai dan ikatan sosial yang berlaku di masyarakat. Radikalisme ini bertentangan dengan tiga sila yang ada di dalam Pancasila yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Persatuan Indonesia (Nizar alif dkk., 2023). Diperlukannya tindakan yang terorganisir dan terkoordinasi untuk mencegah radikalisasi yang lebih luas karena radikalisme merupakan ancaman nyata bagi persatuan dan kerukunan Indonesia. Salah satu cara strategis yang dapat dilakukan dalam pencegahan radikalisme ini yaitu menanamkan internalisasi nilai toleransi satu sama lain melalui pembelajaran PPKn yang berbasis nilai Pancasila (Julita Esra dkk, 2024).

Salah satu pendekatan yang efektif dalam menangkal radikalisme adalah penguatan literasi digital melalui pembelajaran PPKn. Siswa harus dilatih untuk membedakan berita palsu, propaganda ekstremis serta konten yang menyesatkan. Siswa akan dapat lebih cerdas saat menggunakan media sosial jika mereka tahu cara menyaring informasi dan menemukan sumber yang dapat di percaya (Ardi, 2025).

Radikalisme dalam konteks penelitian ini tidak dimaknai sebagai tindakan ekstrem atau terorisme, melainkan sebagai kecenderungan sikap dan cara berpikir siswa yang berpotensi mengarah pada paham radikal apabila tidak dilakukan pencegahan sejak dini melalui pendidikan. Radikalisme di lingkungan, khususnya di kalangan remaja sering kali tidak muncul dalam bentuk kekerasan fisik. Sebaliknya, itu muncul melalui sikap dan perilaku sehari-hari seperti menolak untuk menerima perbedaan pendapat, menganggap pandangan pribadi sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak diskusi demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini berkonsentrasi pada radikalisme sebagai sikap awal yang dapat berkembang tanpa perlindungan melalui pendidikan nilai dan karakter (Werdingisih dkk., 2024).

Berdasarkan hasil pengamatan awal di SMAS Nurul Ikhlas X Koto Kabupaten Tanah Datar, masih ditemukan beberapa perilaku siswa yang kurang mencerminkan nilai toleransi dan kedisiplinan, seperti bolos, keterlambatan, kurang menghargai guru, serta adanya perilaku bullying antar siswa. Kondisi ini berpotensi berkembang menjadi sikap intoleran apabila tidak ditangani secara tepat. Namun demikian, sekolah telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pembelajaran PPKn dan kegiatan sekolah yang menanamkan nilai kebersamaan, religiusitas, dan kedisiplinan.

Masih ada siswa SMAS Nurul Ikhlas X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang menunjukkan kecenderungan kurang bertoleransi dikarenakan latar belakang mereka seperti budaya, keluarga dan daerah yang berbeda-beda. Tetapi sikap siswa yang menunjukkan intoleransi, eksklusivitas maupun fanatisme ini tidak jelas atau terang-terangan terlihat bahwasanya mereka memiliki sikap yang seperti itu. Maka dengan itu masih ada gejala intoleransi ringan di kalangan siswa atau remaja yang terlihat dari perilaku sosial dan interaksi antarsiswa di lingkungan sekolah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan multikultural. Menurut (Mantri dkk., 2024), implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran PPKn dapat menumbuhkan sikap toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman. Selain itu, (Nizar alif dkk., 2023) menyatakan bahwa pencegahan radikalisme di sekolah dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme dilakukan melalui pembelajaran PPKn. (Auzi dkk., 2024) menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk sikap nasionalisme dan toleransi sejak usia dini. (Mantri dkk., 2024) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai benteng utama dalam mencegah radikalisme di lingkungan pendidikan. (Sun dkk., 2024) melalui pembelajaran yang berbasis nilai kebangsaan dan demokrasi, PPKn dapat menjadi benteng utama dalam mencegah radikalisme di sekolah. (Arianti dkk., 2024) pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, serta sikap toleran terhadap perbedaan.

Walaupun kajian mengenai radikalisme ini sudah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian, tetapi masih diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana pembelajaran PPKn dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan remaja, yang kemudian penulis tuangkan dalam penelitian berjudul “Pencegahan Radikalisme di Kalangan Remaja Melalui Pembelajaran PPKn di SMAS Nurul Ikhlas X Koto, Kabupaten Tanah Datar”.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan radikalisme di kalangan remaja melalui pembelajaran PPKn serta faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencegahan radikalisme melalui pembelajaran PPKn di SMAS Nurul Ikhlas X Koto Kabupaten Tanah Datar serta mengidentifikasi faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang efektif dalam mencegah radikalisme serta memperkuat pendidikan karakter peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pencegahan radikalisme di kalangan remaja melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual dan menyeluruh berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Desain penelitian dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari guru PPKn, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, serta siswa di SMAS Nurul Ikhlas X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk melihat langsung proses pembelajaran, wawancara untuk memperoleh informasi mendalam dari informan, serta dokumentasi berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan tata tertib sekolah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan karena dinilai mampu memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai pelaksanaan pencegahan radikalisme serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhinya, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas yang terjadi secara akurat dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pencegahan radikalisme melalui Pembelajaran PPKn

a) Guru memperlakukan siswa secara demokratis

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa guru memperlakukan siswa secara adil dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat teman dan menyelesaikan perbedaan melalui diskusi dan musyawarah, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memperoleh sikap demokratis dan keterbukaan berpikir sebagai hasil dari pembelajaran PPKn. Hal ini juga sesuai dengan teori pembelajaran nilai, yang menekankan betapa pentingnya internalisasi nilai melalui pengalaman belajar yang signifikan.



Gambar 1. Guru PPKn Mengajar di Kelas

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan observasi di kelas XI, peneliti mengamati proses pembelajaran PPKn yang membahas materi Bhineka Tunggal Ika. Guru menyampaikan materi pentingnya keberagaman suku, agama, ras dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kegiatan pembelajaran, guru juga memberikan contoh sikap nyata toleransi serta mengajak siswa untuk saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penerapan peraturan juga berlaku bagi guru, yang diwajibkan hadir tepat waktu, melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal, serta membimbing dan mengawasi siswa. Hal ini menegaskan peran guru sebagai teladan dalam membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, sekolah melibatkan orang tua melalui kewajiban pemberian keterangan ketidakhadiran dan kehadiran dalam rapat sekolah. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam memantau perilaku dan kedisiplinan siswa.

Radikalisme sering dimulai dari sikap yang sempit dan merasa benar, maka dari itu guru harus menerapkan sikap demokratis kepada siswa. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan dengan memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Hal ini sangat penting karena menurut (Prezelj & Lobnikar, n.d.) radikalisasi pada aspek kognitif dimulai dengan penyempitan cara berpikir. Oleh karena

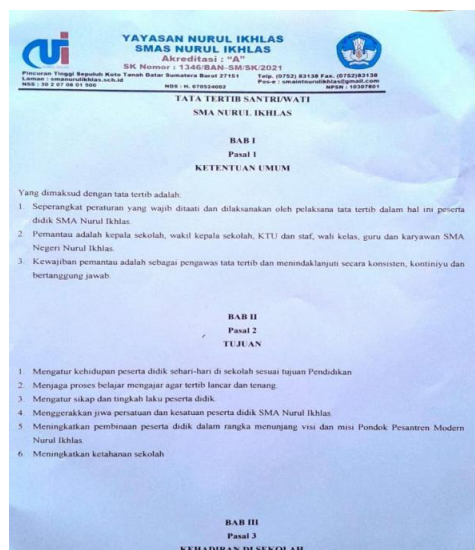
itu, pembelajaran yang demokratis digunakan untuk mencegah siswa berpikir secara eksklusif.

Selain itu, hal ini juga di dukung oleh dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) milik guru PPKn yang mana di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut guru menggunakan metode pembelajaran yang bersifat partisipatif seperti diskusi kelompok dan tanya jawab. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran telah dibuat untuk menciptakan suasana kelas yang demokratis dan interaktif.

b) Guru memberikan contoh sikap yang moderat kepada siswa

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa selama proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat aktif dalam mengikuti diskusi yang dipandu oleh guru. Guru memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pendapat terkait keberagaman serta dampak negatif dari sikap intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai karakter siswa. Di dalam materi Bhineka Tunggal Ika ini adanya penanaman nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mencegah berkembangnya radikal pada siswa.

Pendekatan ini sesuai dengan gagasan pembelajaran nilai, yang menekankan betapa pentingnya proses internalisasi nilai dalam proses belajar. Menurut (Arianto & Faradina, 2019) pendidikan karakter dapat dicapai melalui metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami, merasakan, dan menerapkan prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif itu juga berfokus pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Kemudian guru juga memberikan nilai-nilai multikultural kepada siswa untuk membentuk karakter siswa. Pentingnya nilai multikultural di tanamkan kepada siswa agar siswa memiliki rasa nasionalisme, terutama di negara dengan keberagaman budaya dan suku seperti Indonesia.



Gambar 2. Tata Tertib Siswa SMAS Nurul Ikhlas X Koto, Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2026

Hal ini sejalan dengan tata tertib yang dimiliki oleh sekolah bahwasanya pada bagian bab II pasal 2 (tujuan) mengatur mengenai kehidupan peserta didik, menjaga ketertiban dan meningkatkan ketahanan sekolah. Kemudian pada bagian bab III pasal 3 (kehadiran di sekolah) mengatur kehadiran, disiplin waktu dan kewajiban mengikuti kegiatan sekolah.

Aturan ini penting membentuk kedisiplinan siswa untuk mencegah perilaku menyimpang termasuk kecenderungan radikal.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian (Fitri dkk., 2026) yang menunjukkan bahwa keteladanan guru merupakan salah satu strategi utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan nilai-nilai secara verbal, tetapi juga menunjukkan perilaku yang dapat dicontoh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang ditunjukkan guru melalui sikap adil, menghargai orang lain, dan konsisten terhadap aturan dapat membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai positif yang mendukung terbentuknya sikap moderat dan toleran. Dengan demikian, guru memiliki peran penting sebagai figur yang dapat mencegah berkembangnya sikap eksklusif dan kecenderungan radikal pada remaja

c) **Guru menghargai setiap pendapat siswa secara proposional**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya guru PPKn di dalam kelas selalu menghargai setiap pendapat siswa secara proposional. Guru PPKn tidak mengajarkan siswa untuk saling menyalahkan pendapat teman-temannya, tetapi guru mengajarkan siswa untuk mendengarkan pendapat dari teman nya terlebih dahulu dan jikalau ada yang tidak sesuai maka guru akan mengarahkan siswa supaya diskusi tetap berjalan dengan baik. Begitupun dengan siswa yang lainnya, boleh memberikan masukan kepada temannya, tetapi tetap dengan bahasa yang baik dan tidak menyakiti teman yang berpendapat. guru PPKn selalu mengajarkan penting nya menghargai sesama dan memberikan peluang kepada siswa untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing dengan teratur dan tidak menyalahkan argumen dari teman nya yang lain.



Gambar 3. Guru PPKn Mengajar dengan Menghargai Pendapat Siswa

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2026

Hal ini penting karena siswa yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai cenderung mencari orang lain yang dapat menerima mereka, yang dapat menyebabkan kelompok eksklusif. Sejalan dengan teori (Schröder dkk., 2022) situasi keterasingan sosial adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan remaja radikalisasi. Oleh karena itu, penghargaan terhadap pendapat siswa adalah cara untuk melindungi diri dari perasaan terisolasi. Sejalan juga dengan Tata Tertib yang dimiliki oleh sekolah yaitu pada bagian bab V pasal 5 (sikap/karakter) di dalam tata tertib sekolah. Yang mana dalam bab V pasal 5 ini menjelaskan mengenai menghormati guru dan sesama, bersikap sopan dan ramah, menjaga perkataan dan perilaku, serta larangan menghina, berkata kasar dan pelecehan.

Hal ini sejalan juga dengan pendapat Wahid (2020), yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sikap moderat dan mencegah munculnya sikap radikal dengan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, diskusi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn di sekolah tidak hanya berfungsi sebagai penyebaran informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter. Ini memiliki kemampuan untuk mencegah remaja mengembangkan pandangan dan keyakinan radikal.

Sikap guru yang menghargai setiap pendapat siswa juga sejalan dengan upaya pembentukan budaya sekolah yang positif. (Fitri dkk., 2026) menjelaskan bahwa keterlibatan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Lingkungan yang memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan saling menghargai dapat memperkuat rasa diterima dalam kelompok sosial sehingga mengurangi potensi munculnya sikap eksklusif yang menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap radikalisasi.

d) Guru menekankan perlunya sikap tidak radikal

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti bahwasanya guru PPKn mengaitkan materi pembelajaran elemen Bhineka Tunggal Ika yaitu mendeskripsikan kasus-kasus yang berpotensi meruak kebhinekaan seperti sikap intoleransi, diskriminasi dan pelabelan negatif. Guru menyampaikan materi dengan teliti dan memberikan contoh kasusnya kepada siswa. Sehingga siswa tidak hanya mengetahui teori saja tetapi juga contoh kasus yang ada dan dalam kehidupan di lingkungan sehari-hari siswa. Dengan mengaitkan pelajaran dengan kasus nyata yang terjadi seperti diskriminasi, intoleransi dan penyebaran informasi di media digital, guru juga menekankan pentingnya sikap tidak radikal. Hal tersebut dilakukan karena radikalisme saat ini berkembang melalui interaksi langsung dan media digital.

Alur Dan Tujuan Pembelajaran (ATP) Kurikulum Merdeka

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Profil Pelajar Pancasila	Kata Kunci	Alokasi Waktu	Glosarium
		keragaman kearifan lokal di Indonesia.				sesuai fakta.
		3.1.8 Peserta didik mampu menggambarkan dan membuat perencanaan praktik menjaga kearifan lokal.			2 JP	Ideologi: Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi merupakan kumpulan konsep ber sistem yang
		3.1.9 Peserta didik diharapkan mampu mengenali secara objektif dan mendeskripsikan kasus-kasus yang berpotensi merusak kebhinekaan.		<ul style="list-style-type: none"> Intoleransi Diskriminasi Pelabelan Negatif 	2 JP	
		3.1.10 Peserta didik mampu mengenali secara			2 JP	

Pendidikan Pancasila SMA Fase F Kelas XI

Gambar 4. Dokumen RPP Guru PPKn SMAS Nurul Ikhlas X Koto
Sumber: Dokumentasi Penelitian 2026

Hal ini sejalan dengan RPP guru PPKn yaitu pada bagian alur tujuan pembelajaran di dalam elemen Pancasila, terdapat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global yang membahas mengenai radikalisme, ekstremisme, terorisme, hoaks dan post-truth. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya guru PPKn telah merancang pembelajaran yang kontekstual dengan tantangan zaman, termasuk ancaman ideologi radikal di era digital. Kemudian pada bagian elemen Bhineka Tunggal Ika, siswa diharapkan mendeskripsikan

kasus yang berpotensi merusak kebhinekaan dan mengaitkan kasus tersebut dengan sikap intoleransi, diskriminasi dan pelabelan negatif.

e) Guru mencegah siswa untuk berkelompok-kelompok berdasarkan pandangan

Guru mengajarkan siswa untuk tidak berkelompok-kelompok berdasarkan pandangan. Seperti, siswa hanya bergaul dengan teman-teman dengan kelompok tertentu saja. Disini guru melakukan pembagian kelompok kerja diskusi di kelas secara acak, sehingga siswa dapat berinteraksi dengan semua teman nya dan tidak hanya teman yang sama saja. Hal ini dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan memperkuat rasa kebersamaan diantara siswa. sikap solidaritas sangatlah penting ditanamkan di dalam kehidupan siswa karena, mereka tidak hanya menjalani kehidupan di kelas saja bersama teman tetapi juga diluar kelas.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terbentuknya kelompok eksklusif di sekolah. Kesamaan pendapat dapat mempersulit interaksi sosial dan memperkuat keyakinan sepihak. Ketertarikan pada kelompok tertutup adalah salah satu tanda kerentanan radikalisasi pada aspek sosial menurut teori (Schröder dkk., 2022). Oleh karena itu, guru berusaha untuk memfasilitasi interaksi yang beragam agar siswa terbiasa dengan perbedaan.



Gambar 5. Guru PPKn Menjelaskan materi di dalam Kelas

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2026

Dalam kelas guru juga menjelaskan bahwasanya siswa tidak boleh untuk berkelompok-kelompok, apalagi sampai menyakiti atau membully teman yang tidak kelompok mereka karena berbeda pemahaman baik itu secara perkataan candaan maupun secara fisik. Karena hal ini sejalan dengan aturan tata tertib yang dimiliki sekolah yaitu pada bagian bab VI pasal 6, bab X pasal 10, bab XII dalam tata tertib sekolah menjelaskan mengenai larangan kekerasan. larangan bullying, larangan berkelahi, larangan membawa senjata tajam, bullying (-100) dan kekerasan (-100). Hal tersebut sangatlah relevan karena radikalisme identik dengan tindakan kekerasan.

Selain itu, pembiasaan interaksi sosial yang melibatkan seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang tertentu juga merupakan bagian dari budaya sekolah yang positif. Menurut (Fitri dkk., 2026), pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dapat membentuk budaya sekolah yang mendukung perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pembentukan kelompok diskusi yang beragam menjadi salah satu upaya untuk menanamkan nilai kebersamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan sehingga dapat mencegah terbentuknya kelompok eksklusif di lingkungan sekolah.

Faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah untuk mencegah radikalisme di kalangan remaja SMAS Nurul Ikhlas X Koto, Kabupaten Tanah Datar

a) Keterbukaan lingkungan sekolah

Lingkungan yang terbuka membantu siswa menghindari sikap eksklusif dengan membiarkan mereka menyatakan keluhan dan pendapat mereka tanpa takut. Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pihak sekolah menunjukkan keterbukaan lingkungan sekolah dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan pihak luar ssekolah. Salah satunya yaitu sekolah mengadakan kegiatan lomba pramuka yang diselenggarakan di sekolah SMAS Nurul Ikhlas X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan mengundang siswa dari berbagai sekolah tanpa membatasi latar belakang sekolah. Hal ini menunjukkan bahwasanya pihak sekolah memanglah memberikan dukungan dalam pencegahan radikalisme melalui salah satunya yaitu keterbukaan lingkungan sekolah.



Gambar 6. Kegiatan Lomba Pramuka yang diadakan oleh Sekolah

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2026

Selanjutnya, peran guru sebagai teladan juga sangat penting. Guru tidak hanya memberikan pelajaran, tetapi mereka juga mengajarkan sikap yang mengajarkan toleransi dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang baik antara pendidik dan siswa menghasilkan suasana sekolah yang nyaman dan terbuka, yang membuat siswa merasa dihargai dan tidak terpinggirkan. Tidak ada pengelompokkan berdasarkan latar belakang tertentu dalam interaksi sosial siswa, yang menunjukkan bahwa lingkungan sekolah telah menciptakan budaya yang inklusif.

b) Penerapan nilai universal

Nilai universal termasuk rasa hormat, persaudaraan, kebersamaan dan hidup rukun di tengah-tengah berbagai jenis orang. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan dalam pelajaran, tetapi juga dipraktikkan setiap hari di sekolah. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan mengatur tata tertib sekolah. Aturan yang diterapkan tidak hanya membantu siswa mengontrol perilaku mereka, tetapi juga membangun karakter mereka dengan membiasakan bersikap disiplin dan menghormati sesama. Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilakukan secara teratur juga berperan penting dalam membentuk pemahaman keagamaan siswa yang moderat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada ibadah tetapi juga menanamkan nilai persaudaraan, kebersamaan dan sikap saling menghormati.



Gambar 7. Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Siswa

Sumber: Dokumentasi Wakil bagian Kesiswaan, 2025

Bagian kesiswaan memiliki program untuk mencegah masuknya radikalisme di kalangan remaja yaitu program pelatihan kepemimpinan selama 1 minggu ketika adanya pergantian OSIS. Dari program pelatihan kepemimpinan ini juga ditanamkan kepada siswa untuk toleransi terhadap orang lain, saling menghargai, disiplin, patuh terhadap aturan dan bersikap demokratis.

Penerapan nilai universal di lingkungan sekolah juga diperkuat melalui pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. (Fitri dkk., 2026) menyatakan bahwa budaya sekolah yang dibangun melalui pembiasaan secara konsisten efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Melalui kegiatan yang menanamkan rasa hormat, disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan, siswa memperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini turut mendukung terbentuknya sikap toleran dan moderat yang menjadi benteng terhadap pengaruh paham radikal.

c) Keterlibatan alumni dan wali murid

Salah satu faktor yang berperan dalam pembinaan karakter siswa adalah hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua dan alumni. Melalui kerja sama ini, sikap dan perilaku siswa diawasi di sekolah dan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Walaupun alumni dan wali murid tidak berada dekat di lingkungan sekolah, tetapi keterlibatan alumni dan wali murid sangatlah di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan radikalisme di kalangan remaja. Sesekali alumni akan mendatangi sekolah untuk memberikan motivasi, nasehat dan lainnya kepada siswa yang berada di sekolah.

Kemudian keterlibatan wali murid juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan radikalisme di kalangan remaja. Sewaktu siswa pulang kampung ke rumah masing-masing siswa akan banyak menghabiskan waktu di kampung masing-masing dengan kegiatan mereka masing-masing. Pihak sekolah akan berkomunikasi dengan pihak wali murid untuk tetap bisa memantau siswa supaya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.



Gambar 8. Rapat Alumni dan Wali Murid

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha Sekolah, 2026

Narasi di atas juga di dukung oleh dokumen tata tertib sekolah yang menunjukkan keterlibatan wali murid dalam pembinaan siswa. Pada bagian yang berbicara tentang penanganan pelanggaran siswa, dijelaskan bahwa sekolah akan memanggil orang tua siswa jika mereka melakukan pelanggaran berulang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya melakukan tugasnya sendiri dalam mendidik siswa, tetapi juga bekerja sama dengan orang tua sebagai orang lain yang membantu membangun karakter siswa. Keterlibatan ini membantu mencegah radikalisme di kalangan remaja.

Keterlibatan wali murid dalam pembinaan siswa juga sejalan dengan temuan (Fitri dkk., 2026) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan karakter peserta didik membutuhkan sinergi antara sekolah dan keluarga. Dukungan orang tua melalui pengawasan, komunikasi, dan pembinaan yang berkelanjutan dapat memperkuat nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh sekolah. Oleh karena itu, kerja sama antara sekolah dan wali murid menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang maupun kecenderungan radikal pada remaja.

d) Komunikasi yang berkelanjutan

Komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan kondusif. Setiap masalah dapat segera diselesaikan dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar melalui komunikasi.

Masih ada ditemukan nya beberapa siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan standar kedisiplinan dan karakter, seperti tidak menghargai guru dan membully teman sebaya baik dalam bentuk ucapan maupun fisik. Kemudian, adanya kerja sama antar semua warga sekolah dalam setiap kegiatan juga dapat membantu dalam pencegahan radikalisme. Kegiatan yang bersifat kebersamaan memungkinkan siswa untuk mempelajari pentingnya solidaritas, kerja sama dan tanggung jawab bersama. Sikap siswa yang moderat dan toleran secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan sekolah yang religius, tertib dan mengutamakan kebersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas bukan satu-satunya cara untuk mencegah radikalisme, tetapi juga melalui budaya sekolah yang tercermin dalam kegiatan sehari-hari.



Gambar 9. Rapat Guru SMAS Nurul Ikhlas X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Sumber: Dokumentasi Tata Usaha Sekolah, 2026

Dengan adanya kerja sama antara guru, wali kelas dan pihak sekolah juga dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Keempat komponen ini menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme di SMAS Nurul Ikhlas X Koto tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Ada juga beberapa faktor yang menjadi pendukung dari pencegahan ini yaitu adanya sistem sosial sekolah yang terbuka, hubungan yang harmonis, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Lingkungan seperti inilah yang menjadi benteng yang kuat bagi siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai nasional.

Komunikasi yang berkelanjutan antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif. (Fitri et al., 2026) menjelaskan bahwa pembentukan karakter peserta didik tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antar berbagai pihak dapat memperkuat upaya pencegahan radikalisme karena siswa memperoleh pengawasan dan pembinaan yang konsisten baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme di kalangan remaja di SMAS Nurul Ikhlas X Koto dilakukan melalui pembelajaran PPKn sebagai upaya strategis dalam membentuk karakter siswa yang toleran dan inklusif. Hal ini dilatarbelakangi oleh kerentanan remaja terhadap pengaruh paham radikal serta ditemukannya perilaku awal intoleransi seperti kurang menghargai dan bullying. Pelaksanaan pencegahan dilakukan melalui lima strategi, yaitu memperlakukan siswa secara demokratis, memberikan keteladanan sikap moderat, menghargai pendapat siswa secara proporsional, menanamkan sikap anti radikal, serta mencegah pengelompokan siswa berdasarkan pandangan tertentu.

Selain itu, pencegahan radikalisme juga didukung oleh peran aktif sekolah melalui lingkungan yang terbuka, penerapan nilai universal, keterlibatan alumni dan wali murid, serta komunikasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pencegahan radikalisme tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui kolaborasi seluruh komponen sekolah dalam membentuk karakter peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, R. (2025). Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangkal Radikalisme. *JAKAP: Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran*, 1(1), 91–99. <https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/JAKAP/article/view/17/14>
- Arianti, A., Salsabilla, E., Adhim, M. F., & Widia, N. A. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Remaja Gen Z. 1(3), 226–232.
- Arianto, F., & Faradina, F. D. (2019). Header halaman genap: Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match dalam. 1(1), 1–6.
- Auzi, C., Saragi, D., Ndong, Y., & Negeri, U. (2024). Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme pada Kalangan Siswa Sekolah Dasar. 721–729. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02>.
- Fitri, N. A., Moeis, I., & Tiara, M. (2026). Upaya sekolah dalam membangun karakter tanggung jawab siswa SMP. 6(1).
- Mantri, Y. M., Ramdani, D., & Ginanjar, D. (2024). Peran Pendidik Kewarganegaraan Guna Mencegah Radikalisme. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 9474–9479. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5281>
- Nizar alif, M., Wibowo, B. S. M., Putra, R. B. C. M., & Putri, A. M. S. (2023). Upaya Pencegahan Potensi Radikalisme dengan Penanaman Ideologi Pancasila di Lingkup Sekolah. *Journal of Education Research*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.118>
- Prezelj, I., & Lobnikar, B. (n.d.). Identifikacija in spremljanje radikalizacije na osnovi. 6–26.
- Schröder, C. P., Bruns, J., & Lehmann, L. (2022). Radikalisasi pada Remaja: Identifikasi Kelompok Rentan. 177–201. <https://doi.org/10.1007/s10610-022-09505-x>
- Sun, E., Barus, L., Sembiring, I., Pransiska, I., Siboro, B., Haloho, J., Simanjuntak, M. B., Sianturi, T. C., & Pardede, W. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media Citizenship Education As a Media for Preventing. 6576–6581.
- Werdiningsih, R., Hadiati, T. L., & Wirasati, W. (2024). Transforming Anti-Radicalism Education through Synergized Curriculum, Social Engagement, and Adaptive Learning Strategies. December.